

SKRIPSI

EKSISTENSI PARTAI ISLAM : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA PADA PEMILU 2019

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

MUHAMMAD ALIF BASO MAHENDRA J.

E041181509

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

EKSISTENSI PARTAI ISLAM : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN GOWA PADA PEMILU 2019

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ALIF BASO MAHENDRA J.

E041181509

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

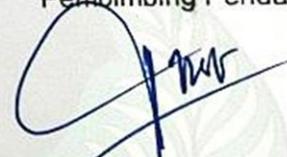
Pada tanggal : 7 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,

Dekan, Departemen Ilmu Politik




Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**EKSISTENSI PARTAI ISLAM : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN GOWA PADA PEMILU 2019**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ALIF BASO MAHENDRA J.

E041181509

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alif Baso Mahendra J.

NIM : E041181509

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Eksistensi Partai Islam : Partai Persatuan Pembangunan Di Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2019”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2023



(MUHAMMAD ALIF BASO MAHENDRA J.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EKSISTENSI PARTAI ISLAM : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA PADA PEMILU 2019”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama teruntuk Ibu saya Ir. Rimawaty Mansur , dan Bapak Junaedi Muin, terimakasih banyak, bahkan kata terima kasih tidak cukup untuk membalas kebaikan Ibu dan Bapak, terima kasih selalu ada dan selalu mendukung dan mensupport selama saya kuliah.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat

penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.

7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Hamzah, S.Sos., Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2018. Teman-teman dari awal perkuliahan hingga saat ini yang insyaallah akan tetap menjadi teman yang baik. Terima kasih atas cerita yang diukir selama ini semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan masing-masing.
10. Teruntuk Moris terima kasih telah menjadi teman baik, dan menyenangkan untuk penulis selama ini, terima kasih untuk pertemanannya dan menjadi semangat untuk penulis. Semoga kelak nanti bisa bertemu kembali dan bertukar cerita perjuangan hebat masing-masing.

11. Teruntuk (Zaky, Kaisar, Irsyad) terima kasih selalu ada saat penulis butuh, dan terima kasih sudah menjadi teman selama kuliah, semangat buat kalian semua dalam mengejar gelar S.IP.
12. Teruntuk kakak kakakku Maydi Safira S.H., Mutiara Sagita S.H. dan Rifail Kabbah S.M., terimakasih selalu ada, semoga kita kompak selalu, dan semoga kalian juga dilancarkan Pendidikan dan karirnya.
13. Untuk Kakek tersayang H. Mansur terimakasih atas kasih sayangnya selalu menyayangi, dan memberikan motivasi.
14. Teruntuk seseorang yang bernama Inas Mawaddah, terima kasih sudah selalu ada buat penulis, tempat penulis bercerita, berkeluh kesah, dan tempat dimana penulis bisa belajar yang namanya kepercayaan itu penting. Semoga kamu bisa sukses dan cita-citamu bisa kau capai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, Juni 2023

MUHAMMAD ALIF BASO MAHENDRA J.

ABSTRAK

Muhammad Alif Baso Mahendra J. E041181509. Eksistensi Partai Islam : Partai Persatuan Pembangunan Di Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2019. Di bawah bimbingan Andi Yakub sebagai Pembimbing Utama dan Gustiana A. Kambo sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keanggotaan dan kepemimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gowa mendapat kursi terbanyak DPRD Kabupaten Gowa dalam pemilihan legislatif 2019. Partai berlambang Ka'bah itu berhasil meloloskan 8 (delapan) usungan caleg untuk menduduki kursi DPRD Gowa. Hasil ini juga memastikan PPP mendapat kursi Ketua DPRD Gowa Periode 2019-2024

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif naratif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dibahas dalam kerangka teoritis pemikiran Maurice Duverger tentang keanggotaan dan kepemimpinan di dalam partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal keanggotaan ada 2 (dua) hal yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Gowa. Pertama, PPP terbuka untuk merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk bergabung dan menjadi caleg PPP. Tokoh-tokoh masyarakat ini didekati dan diberi kemudahan dalam menjadi caleg PPP. Kedua, PPP Kabupaten Gowa terbuka dengan tidak meminta mahar politik kepada calegnya. Hal ini membuat para caleg merasa nyaman dan fokus bekerja dalam memenangkan pemilu. Sementara itu, dalam hal kepemimpinan ada 2 (dua) hal yang menarik. Pertama, kebijakan Nursyam Amin sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Gowa yang inklusif. Kedua, adanya pengaruh Amir Uskara, anggota DPR-RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP yang membantu kampanye dan logistik caleg-caleg DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kata Kunci : Partai Islam, Keanggotaan, Kepemimpinan

ABSTRACT

Muhammad Alif Baso Mahendra J. E041181509. The Existence of Islamic Parties: The United Development Party in Gowa Regency in the 2019 Election. Under the guidance of Andi Yakub as the Main Advisor and Gustiana A. Kambo as the Assist Advisor.

This study aims to determine the form of membership and leadership in the United Development Party (PPP) so as to increase the number of seats in the Gowa Regency DPRD in the 2019 election. In the 2019 election, the Gowa United Development Party (PPP) won the most seats in the Gowa Regency DPRD in the 2019 legislative election. The party with the Kaaba symbol succeeded in getting 8 (eight) candidates to occupy seats in the Gowa DPRD. This result also ensured that PPP won a seat as chairman of the Gowa DPRD for the 2019-2024 period

The type of research used is narrative qualitative research. The data collection is done through interviews and documentation. The data obtained is then discussed in the theoretical framework of Maurice Duverger's thoughts about membership and leadership in political parties.

The results of this study indicate that in terms of membership there are 2 (two) things that are carried out by PPP Gowa Regency. First, PPP is open to recruiting community leaders to join and become PPP candidates. These community leaders were approached and given facilities in becoming PPP candidates. Second, PPP Gowa Regency is open by not asking for political dowry from its candidates. This makes the candidates feel comfortable and focus on working in winning the election. Meanwhile, in terms of leadership there are 2 (two) interesting things. First, Nursyam Amin's policy as Chair of the Gowa Regency PPP DPC is inclusive. Second, there was the influence of Amir Uskara, a member of the DPR-RI who is also Deputy Chairperson of the PPP DPP who assisted the campaign and logistics of the Gowa Regency DPRD candidates from the United Development Party.

Keywords: Islamic Party, Membership, Leadership

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pemikiran Maurice Duverger Tentang Partai Politik	15
2.1.1. Keanggotaan Dalam Partai Politik	15
2.1.2. Kepemimpinan Dalam Partai Politik	25
2.3. Penelitian Terdahulu.....	32
2.4. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian	38
3.3. Jenis dan Sumber Data	39

3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Informan Penelitian.....	42
3.6. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	45
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	45
4.2. Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
5.1. Keanggotaan Dalam Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa.....	58
5.1.1. Merekrut Tokoh-Tokoh Masyarakat	59
5.1.2. Kemampuan Melaksanakan Tanggung.....	68
5.2. Kepemimpinan Dalam Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa.....	73
5.2.1. Kebijakan Nursyam Amin Untuk PPP Gowa Yang Inklusif.....	74
5.2.2. Intervensi Amir Uskara Sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP	78
BAB VI PENUTUP.....	86
6.1. Kesimpulan.....	86
6.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perolehan Suara DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2019.....	8
--	---

DAFTAR TABEL

Gambar 4.1.1. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Gowa.....	49
Gambar 4.1.2. Dapil dan Kursi DPRD Kabupaten Gowa	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik berfungsi menjadi saluran aspirasi dan kepentingan dari segmen-segmen tertentu atau bahkan segmen yang luas yang ada di masyarakat. Mereka berjuang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara-cara yang konstitusional. Dalam perjuangannya itu, mereka harus terlibat dalam persaingan dan kerja sama baik dengan sesama partai politik maupun dengan institusi-institusi lainnya. Mereka tidak terlepas dari suatu diktum bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan yang abadi.

Partai Islam hadir di tengah-tengah menguatnya institusi negara-bangsa yang modern pada negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sebagian dari partai Islam justru muncul karena merespons gejala sekulerisasi yang semakin menjauhkan aspek-aspek agama dari kehidupan sosial politik. Mereka merupakan bagian dari instrumen kebangkitan gerakan keagamaan dalam perubahan sosial yang terseret modernisasi dan westernisasi. Tetapi sebagian lainnya muncul untuk memperkuat rezim yang otoriter atau menciptakan tatanan politik teokrasi. Karena karakteristik partai Islam sangat beragam dan tergantung pada

situasi politik yang berlangsung di negaranya, mereka tidak mungkin dapat dipahami sebagai fenomena yang tunggal. Sebagaimana karakteristik politik Islam itu sendiri yang dipengaruhi oleh situasi dan konteks lokal, demikian pula karakter partai Islam terbentuk sesuai responsnya terhadap situasi yang ingin mereka atasi¹.

Bangkitnya partai-partai Islam dalam pemilu menandakan berlangsungnya reorganisasi kekuatan kelompok-kelompok Islam yang menghubungkan partai Islam, komunitas Muslim, organisasi Islam, dan organisasi-organisasi paramiliter². Mereka berupaya untuk memperkuat pengaruh Islam dalam ruang sosial dan politik di masyarakat ketika dominasi rezim Orde Baru memudar. Partai-partai berbasis Islam tampil dengan simbol-simbol Islam yang kuat. Wacana tentang pentingnya menerapkan prinsip Islam sebagai solusi atas krisis multi dimensi menjadi topik yang senantiasa mereka kemukakan. Sebagian partai Islam, yakni PPP dan PBB, bahkan berusaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta dengan kalimat kunci “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Sekilas, tindakan-tindakan tersebut terjadi karena penuh dengan dorongan ideologis, di mana partai-partai Islam berupaya

¹ Herdiansah, Ari G. 2017. Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2). Hal. 152-167

² Mosheni, Payam and Clyde Wilcox. 2012. *Religion and Political Parties*. New York: Routledge.

menerapkan prinsip dan simbol Islam ke dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan.

Dinamika politik Indonesia selepas Orde Baru melahirkan banyak partai Islam. Setelah hanya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili umat Islam, partai-partai Islam pun turut bermunculan dan tidak menghimpunkan diri dalam PPP seperti sebelumnya. Dari puluhan partai lahir pada awal masa reformasi, tidak banyak partai Islam bertahan. Hanya ada empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR periode 2019-2024, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik yang dimotori oleh NU di Indonesia. Setelah era Orde Baru berakhir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik (parpol). KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU, karena terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Oleh karena itu, Gus Dur bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis *ahlussunah wal jamaah*. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu

KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, dan KH A. Muchith Muzadi. Usai pembentukan partai dan pemilihan nama, maka pada 23 Juli 1998, deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilaksanakan di Jakarta. Pemilihan nama tersebut sesuai dengan sifat yang dijunjung dari parpol ini, yaitu kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis.

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dikenal sebagai corong politik umat Muhammadiyah. Asas partai ini adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia, dengan salah satu tujuannya adalah ingin mewarnai hukum Indonesia dengan hukum Islam. Seiring maraknya penentangan oleh sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Suharto yang mewajibkan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka, muncullah gerakan-gerakan tarbiyah yang terinspirasi oleh jamaah Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Organisasi Tarbiyah ini lalu mendirikan lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto. Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002. Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP atau P3) adalah partai politik Islam tertua di Indonesia saat ini. Pada saat

pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973³.

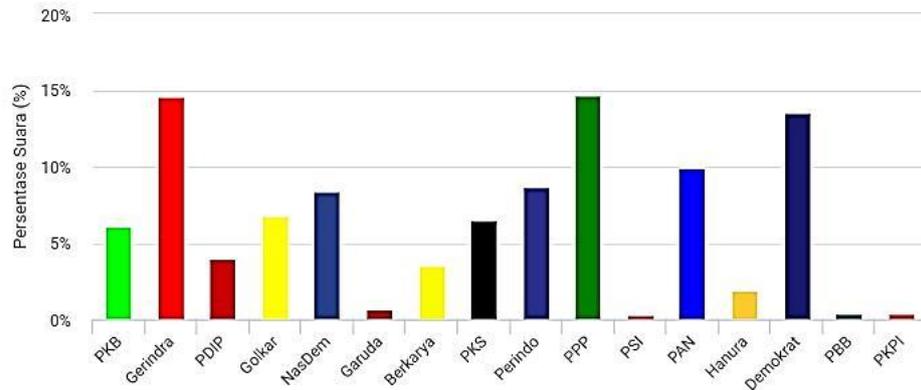
Partai-partai Islam yang ada di Indonesia saat ini jika dibandingkan, maka memiliki perbedaan satu sama lain. Partai Persatuan Pembangunan cenderung memiliki kemiripan dengan PKB dibandingkan dengan PAN, karena saat ini PPP cenderung memiliki basis pada umat NU dan kelompok Islam tradisional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pengisian pucuk jabatan partai baik di pengurus harian partai maupun di majelis Syariah partai yang senantiasa diisi oleh kader atau ulama NU. Hanya saja PPP tidak se-moderat PKB dan PPP yang cenderung bergerak menjadi partai tengah yang merangkul semua golongan dan menunjukkan citra nasionalis. PPP tetap pada pendiriannya sesuai logo Ka'bah yakni sebagai partai yang merepresentasikan perjuangan umat Islam Indonesia. PPP dan PKS dalam beberapa isu misalnya liberalisasi sosial budaya

³ Al-Hamdi, Ridho. 2017. Moving towards a Normalised Path: Political Islam in Contemporary Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan (Journal Of Government & Politics)*, 8(1). Hal. 53-62

memiliki sikap politik yang sama, namun jika kita lihat setelah Pemilu 2019 PKS berusaha mencitrakan dirinya sebagai partai Islam yang terbuka dan modern, berbeda dengan PPP yang selalu menyerukan bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai warisan para ulama Indonesia yang besar di masa lalu.

PPP sebagai partai Islam tertua yang masih eksis hingga hari ini, tidak berbanding dengan kekuatan elektoralnya yang semakin merosot. Pada Pemilu 2019 PPP hanya mengantongi 4,52 persen suara dari ambang batas 4 persen. PPP hanya mengirimkan 19 kursi wakilnya. Pada Pemilu 2014, PPP mendapatkan suara 6,53 persen. Pada 2009, PPP mengantongi suara 5,32 persen, Pemilu 2004 di empat besar dengan suara 8,15 persen, dan Pemilu 1999 10,71 persen⁴. Walaupun faktanya demikian, Partai Persatuan Pembangunan mengalami kenaikan suara dan kemenangan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

⁴ Merdeka.com. 22 April 2021. Partai Islam Dilanda Krisis Kemenangan. <https://www.merdeka.com/khas/partai-islam-dilanda-krisis-kemenangan-mildreport.html>



Gambar 1. Perolehan Suara DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2019

Sumber : <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/>

Pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gowa berhasil meraih perolehan suara 60.065 dengan persentase 14,64%. PPP mendapat kursi terbanyak DPRD Kabupaten Gowa dalam pemilihan legislatif 2019. Partai berlambang Ka'bah itu berhasil meloloskan 8 (delapan) usungan caleg untuk menduduki kursi DPRD Gowa. Hasil ini juga memastikan PPP mendapat kursi Ketua DPRD Gowa Periode 2019-2024, yaitu Rafiuddin Raping. Kemenangan ini memiliki selisih tipis dengan Partai Gerindra yang memperoleh persentase sebesar 14,56% dengan perolehan sebanyak 7 (tujuh) kursi⁵. Dibandingkan dengan tiga partai lainnya, PKB berhasil meningkatkan perolehan kursi dari 1 kursi menjad 4 kursi. PKS sendiri tidak mengalami peningkatan karena jumlah

⁵ TribunGowa.com. 14 Mei 2019. PPP Kalahkan Partai Prabowo Subianto di Gowa, Peroleh 8 Kursi & Gerindra 7, Ini Jumlah Suaranya. <https://makassar.tribunnews.com/2019/05/14/ppp-kalahkan-partai-prabowo-subianto-di-gowa-peroleh-8-kursi-gerindra-7-ini-jumlah-suaranya>.

kursi dari 2014 ke 2019 tetap sama yaitu 3 kursi. PAN justru mengalami penurunan dari 5 kursi menjadi 3 kursi, sehingga untuk DPRD Kabupaten Gowa hanya PKB dan PPP sebagai partai Islam yang mengalami peningkatan jumlah kursi. Hanya PPP yang berhasil memenangkan Pileg DPRD Kabupaten Gowa dan menghantarkan kadernya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Gowa 2019-2024.

Perolehan kursi PPP Gowa meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019, PPP Gowa hanya mendapat 6 kursi dan kini bertambah menjadi 8 kursi. Kemenangan PPP di Kabupaten Gowa berhasil mengambil jatah kursi Ketua DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Golkar yang sebelumnya 9 (sembilan) menjadi 3 (tiga) kursi saja di Pemilu 2019. Kemenangan ini sebenarnya tak lepas dari sosok figur Amir Uskara, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP dan Ketua Fraksi PPP di DPR-RI periode 2019-2024. Amir Uskara merupakan putra asli dari Kabupaten Gowa. Saat ini Amir Uskara juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang mengurus keuangan dan perbankan.

Masyarakat Gowa mengenal Amir Uskara sebagai anggota DPRD Gowa periode 1999-2002, kemudian berlanjut dipilih lagi hingga Pemilu 2004-2009 dan di Pemilu 2009 ia meningkat dengan menduduki anggota

DPRD tingkat Provinsi Sulsel hingga 2014. Sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan saat itu, ia sudah membuktikan kemampuan *leadership* dalam membangun konsolidasi partai berlambang Ka'bah di Sulsel. Hingga dalam perjalanannya kemudian, tepatnya pada Pemilu tahun 2014 ia menduduki kursi parlemen tingkat pusat dan berhasil hingga memasuki periode keduanya. Pada Pemilu 2019 lalu kemenangan PPP di Kabupaten Gowa menjadi batu loncatan bagi Amir Uskara dimana berkat kemenangan tersebut dirinya dijagokan menjadi Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2024.

Terkait Pileg 2019 DPRD di Kabupaten Gowa, Amir Uskara turut memberikan semacam bantuan keuangan bagi para caleg yang maju dari Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini dilakukan agar para caleg tidak khawatir akan sumber daya yang dimiliki sekaligus membuat kampanye lebih efisien. Setiap kampanye dari caleg PPP di DPRD Kabupaten Gowa maka di dalamnya juga ada kampanye dari Amir Uskara sebagai caleg DPR-RI. Hasilnya, Amir Uskara berhasil memperoleh suara tertinggi untuk caleg DPR-RI terpilih Dapil Sulsel I sebanyak 91.970 suara dan PPP juga memenangkan Pileg DPRD di Kabupaten Gowa, kampung kelahiran Amir Uskara.

Dengan kemenangan pada Pemilu 2019, DPW PPP Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai basis wilayah pemenangan utama untuk Pemilu 2024 nantinya. Walaupun pada tingkat nasional perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan drastis dimana kursi DPR PPP dari 39 kursi menjadi 19 kursi dan perolehan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menurun dari 7 kursi menjadi 6 kursi, hal tersebut tidak berlaku bagi perolehan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Gowa. Partai Islam justru mampu memenangkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Gowa yang selama ini dipegang oleh Partai Golkar. Perolehan suara PPP juga mampu bersaing tipis mengungguli Partai Gerindra di bawahnya. Hal ini didukung oleh figur Amir Uskara, fungsionaris PPP di level nasional dan DPR-RI yang merupakan orang asli Gowa. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi PPP di Kabupaten Gowa untuk mendapatkan dukungan masyarakat karena pengaruh ketokohan dan membuat orang tertarik untuk mencalonkan diri melalui PPP. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“EKSISTENSI PARTAI ISLAM : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA PADA PEMILU 2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk keanggotaan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana kepemimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk keanggotaan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang yang terkait partai politik terkhusus pada perkembangan partai politik Islam di Indonesia dan di tingkat lokal.
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang partai politik yang mengkaji eksistensi partai-partai Islam di Indonesia pasca reformasi yang perolehan suaranya justru menurun dan tidak mampu menyaingi perolehan suara partai nasionalis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai eksistensi partai-partai Islam sebagai bagian dari permasalahan partai politik saat ini.
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang bagaimana sebuah partai politik Islam mampu memenangkan pemilu pada tingkat lokal di daerah yang selama ini dikuasai oleh partai nasionalis.

- c. Menjadi acuan pembelajaran bagi para partai politik Islam dalam upaya untuk mencapai kemenangan pada pemilu-pemilu berikutnya.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai keanggotaan dan kepemimpinan dalam partai politik sebagai landasan teoritis dan alat analisis utama untuk melihat kemenangan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019 sebagai bentuk dari eksistensi partai Islam. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambarkan dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaharuan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

2.1. Pemikiran Maurice Duverger tentang Partai Politik

2.1.1. Keanggotaan Dalam Partai Politik (*Party Membership*)

Maurice Duverger menjelaskan suatu uraian tentang partai politik dengan menekankan bahwa mencari perbedaan karakteristik partai-partai politik itu sendiri bisa dilakukan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. Mencari karakteristik partai-partai politik bisa dilakukan dengan meninjau segi organisasi, keanggotaan, maupun aspek kepemimpinannya. Dengan cara tersebut Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan “*direct structure*” dan “*indirect structure*”. Struktur yang pertama keanggotaan seseorang dalam

partai politik semata-mata dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikatkan diri dalam partai tertentu. Sedangkan struktur yang kedua, keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik diperoleh berdasarkan keikutsertaannya dalam organisasi yang bernaung di bawah suatu partai⁶. Contoh keanggotaan partai politik tidak langsung ini dapat dilihat di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dimana hampir semua partai politik memiliki organisasi onderbouw pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti buruh, tani, nelayan dan lain-lain.

Pembedaan antara partai "massa" dan "kader" pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Les Partis Politiques*. Inti dari perbedaannya adalah perbedaan dalam struktur keuangan mereka. Bagi Duverger, perbedaan utama antara kedua jenis partai ini terletak pada strukturnya. Partai "kader" umumnya termasuk dalam "keanggotaannya" (kalau bisa dikatakan memiliki keanggotaan tertentu) hanya sekelompok terbatas dari orang-orang paling aktif yang berbagi tujuan partisan yang sama, sedangkan partai "massa" terbuka untuk semua yang peduli untuk bergabung. Dua faktor yang menentukan sistem keanggotaan yang khas adalah metode pendidikan politik para anggota dan organisasi keuangan. Partai "kader" melakukan sedikit atau tidak

⁶ Duverger, Maurice. 1984. *Partai Politik dan Kelompok Kepentingan*. Jakarta: Bina Aksara.

sama sekali pendidikan politik bagi para anggotanya sendiri, sedangkan partai "massa" pada umumnya melaksanakan program pendidikan massa internal yang ekstensif. Tetapi dalam pembiayaan mereka perbedaan itu paling menonjol. Secara finansial, partai "kader" bergantung pada kontribusi beberapa pendukung besar, seringkali dari luar partai, sedangkan partai "massa" pada dasarnya didasarkan pada iuran yang dibayarkan oleh para anggotanya⁷.

Duverger merinci sejumlah perbedaan besar lainnya antara kedua jenis partai ini, termasuk kelas, orientasi ideologis, dan tingkat komitmen. Akan tetapi, dia sangat menonjolkan unsur-unsur yang terkait langsung dengan struktur organisasi. Ini termasuk perbedaan-perbedaan berikut. (1) Partai massa condong ke unit "cabang" sebagai bentuk organisasi lokalnya. Ini "berbasis lebih luas dan kurang eksklusif" daripada "kaukus" partai kader. Di dalam partai massa, pendidikan politik anggota melengkapi kegiatan elektoral, dan ada organisasi administratif dengan pejabat tetap. (2) Partai massa terartikulasi dengan kuat, dan (3) lebih tersentralisasi dibandingkan partai kader. (4) Memiliki kepemimpinan yang lebih oligarkis dibandingkan partai kader, dan (5) jumlah anggota yang sangat besar dibandingkan partai kader. Terakhir, (6) ia memiliki

⁷ Angell, H. M. 1987. Duverger, Epstein and the Problem of the Mass Party: The Case of the Parti Québécois. *Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne de Science Politique*, 20(2), 363–378.

jangkauan aktivitas yang jauh lebih besar, bahkan permanen, daripada partai kader, yang menyelimuti sebagian besar kehidupan komunitas anggota; hal ini dibandingkan dengan kegiatan elektoral atau peristiwa politik khusus yang mencirikan partai kader⁸.

Mengenai pengorganisasian partai-partai dalam demokrasi, Duverger melihatnya sebagai perkembangan alami dari partai 'kader' menjadi partai 'massa'. Bagi mereka konsep 'keanggotaan' tidak banyak artinya. Sebaliknya partai-partai ini mencerminkan kebutuhan terbatas para pemimpin partai untuk beberapa cara menjangkau pemilih di era sebelum hak pilih universal. Hak pilih universal dimana Duverger menegaskan, menciptakan kondisi untuk jenis organisasi baru. Partai-partai semacam itu dengan jelas mendefinisikan anggotanya, memberi mereka peran sentral dalam mengarahkan partai, dan mengabdikan diri untuk kepentingan anggota. Para anggota terlibat erat dalam menentukan strategi partai dan dalam menyediakan pekerjanya. Iuran anggota memberikan dukungan keuangan yang dibutuhkan untuk kegiatan partai.

Bagi Duverger, perbedaan antara partai 'keanggotaan' dan 'kader' bukanlah masalah klaim keanggotaan; sebaliknya, hubungan antara partai dan anggotanyalah yang mendefinisikan partai 'keanggotaan'. Partai

⁸ Ibid.

keanggotaan sejati adalah tentang anggotanya, tentang membawa mereka ke dalam politik dan mendidik mereka tentang alat-alat politik.

Dalam membayangkan kontrol partai politik oleh anggota yang diambil dari pemilih, Duverger memegang pandangan yang dipegang secara luas tentang bagaimana partai harus diorganisir. Pemilihan berulang menawarkan perangkat pengorganisasian yang menarik kepada kelompok mana pun. Dengan meluasnya hak pilih, serikat buruh, gereja, dan koperasi, semua organisasi yang beranggotakan berusaha untuk menggunakannya, baik dalam membentuk partai-partai baru maupun dalam mempengaruhi partai-partai yang sudah ada. Gerakan sosialis, khususnya, telah melihat dalam pemilihan sebuah mekanisme di mana mereka dapat merekrut anggota dan mengorganisir diri mereka sendiri⁹.

Dalam kaitannya dengan karakteristik keanggotaan, Duverger membedakan antara partai-partai kader (*cadre party*) dengan partai massa (*mass party*). Proses seleksi keanggotaan dalam partai kader dilakukan dengan sangat ketat dan memperhatikan berbagai aspek, seperti keterampilan, prestise, pengalaman politik serta bobot pengaruhnya yang diharapkan bisa menarik pendukung-pendukung dalam pemilihan umum. Partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota

⁹ Ibid.

yang sebanyak-banyaknya dengan elit kepemimpinan yang diseleksi secara ketat¹⁰.

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Tanpa rekrutmen politik, partai politik tidak memiliki anggota atau figur yang handal dalam berbagai kegiatan politik. Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana sebuah partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga terkait dengan bagaimana seseorang, baik dari "*in group*" maupun "*out group*".

Rush & Althof mendefinisikan rekrutmen politik sebagai, "Proses dimana individu menjamin atau mendaftarkan dirinya untuk menduduki suatu jabatan. proses dua arah, karena individu mungkin bisa mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain dan mendapatkan posisi tertentu. Begitu juga rekrutmen bisa formal jika individu direkrut secara terbuka melalui metode seleksi prosedural dan institusional. Kemudian disebut informal, ketika individu direkrut privat (sendirian) atau "di bawah tangan" tanpa melewati atau sangat sedikit melalui sarana kelembagaan".

¹⁰ Ibid.

Rekrutmen didefinisikan sebagai proses di mana individu atau kelompok individu terlibat dalam peran politik aktif. Pengertian rekrutmen semacam itu relatif umum. Khusus dalam konteks politik, rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi calon (pencalonan), rekrutmen legislatif dan eksekutif. Rekrutmen dalam pengertian umum mencakup bagaimana partai merekrut anggota. Sedangkan dalam konteks rekrutmen politik umumnya terkait dengan sistem pemilu dan sistem politik yang berlaku, khususnya untuk mengisi jabatan sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, secara garis besar fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Pertama, Rekrutmen anggota dan relawan. Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu partai politik agar dapat diakui oleh negara sebagai partai politik adalah memiliki keanggotaan minimal tertentu. Oleh karena itu, rekrutmen keanggotaan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Semua partai politik pada dasarnya tidak ada yang membatasi keanggotaannya. Rekrutmen dilakukan secara terbuka.
2. Kedua, Rekrutmen manajemen dan staf. Rekrutmen pengurus dan staf partai memiliki kriteria dan proses seleksi yang lebih ketat dibandingkan rekrutmen anggota. Proses penentuan kriteria dan seleksi pengurus partai dilakukan melalui musyawarah atau rapat

partai besar yang melibatkan pengurus dan/atau anggota partai lama. Rekrutmen kepengurusan dibutuhkan untuk kepentingan internalnya, dimana masing-masing pihak membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Hal ini wajar karena hanya dengan kader seperti itulah dia bisa menjadi partai yang memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan dirinya. Dengan memiliki kader partai yang baik, parpol tidak akan kesulitan untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan berpeluang mengajukan calon untuk masuk dalam bursa kepemimpinan nasional.

3. Ketiga, Rekrutmen calon pejabat publik. Rekrutmen calon pejabat publik oleh partai politik pada dasarnya membuka kesempatan yang sama untuk masuk, bersaing (bersaing), dan dapat menduduki jabatan politik dan pemerintahan bagi setiap warga negara. Setelah itu, akan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin direkrut menjadi kandidat. Persyaratan ini diterapkan oleh partai politik dengan pertimbangan objektif, rasional, sesuai ketentuan yang berlaku. Tentu tidak semua jabatan bisa diisi oleh peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan profesional di bidang PNS, dan lain-lain yang tidak bersifat politis (potensi pengangkatan), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam

pengisian jabatan politik dan karena itu memerlukan penunjukan pejabat melalui prosedur politik juga (*political appointment*).

Beberapa teori menyatakan bahwa pemilihan kandidat adalah tahap kunci dan menentukan. Karena proses rekrutmen akan menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan yang akan memerintah. Hasil tersebut tergantung dari proses rekrutmen yang digunakan, biasanya meliputi tiga tahapan yaitu tahapan sertifikasi, nominasi dan seleksi. Tahap sertifikasi merupakan tahap atau pendefinisian awal, yang meliputi penentuan kriteria yang diinginkan, aturan internal partai, aturan pemilu, dan norma sosial. Sedangkan tahap pencalonan berkaitan dengan ketersediaan (kader partai) yang memenuhi syarat dan jabatan yang akan diisi. Tahap selanjutnya berkaitan dengan proses seleksi, yang secara umum berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang terlibat untuk memilih, dan bagaimana menentukan siapa yang akan menang. Mengenai dasar atau alasan rekrutmen politik, Barbara Geddes mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi empat model :¹¹

1. Pertama, *partisanship*, yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai berdasarkan loyalitas kepada partai dan berusaha

¹¹ Geddes, Barbara. 1996. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. California: University California Press.

menghimpun partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi.

2. Kedua, meritokratis, yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain.
3. Ketiga, kompartementalisasi, yaitu rekrutmen politik berdasarkan informasi pengangkatan meritokratis untuk posisi-posisi yang dianggap penting untuk keberhasilan pragmatis, sekaligus memungkinkan penggunaan penunjukan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut setia.
4. Keempat, *survival*, yaitu rekrutmen politik berdasarkan asas timbal balik dan sumberdaya pelamar dan cenderung patronase.

Penerapan pola kaderisasi yang baik dan berkesinambungan dalam rekrutmen partai politik tentunya akan berdampak pada kualitas kader yang dihasilkan oleh partai politik tersebut. Pada dasarnya, format sistem pengkaderan partai harus ditata sebaik mungkin. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu mempersiapkan dan memproyeksikan kader partai politik sebagai pemimpin masa depan. Penyiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan, dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus diatur sesuai dengan orientasi karir politiknya, agar tidak ada lagi politisi yang merangkap jabatan di

pemerintahan serta pengurus pemerintahan. struktur partai dan melibatkan sejumlah besar anggota keluarga dalam jabatan politik.

Dengan pola kaderisasi yang baik dan berkesinambungan, kader partai politik akan siap dicalonkan dalam pemilihan umum baik anggota DPR/DPRD maupun pemilihan kepala daerah/kepala negara. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing pihak memiliki caranya masing-masing dalam melakukan pola regenerasinya. Berdasarkan ideologi misalnya, partai berbasis agama tentu akan memiliki pola yang berbeda dengan partai nasionalis. Begitu juga partai yang sudah lama berdiri, tentu pola pengkaderannya jauh lebih matang dibanding partai baru.

2.1.2. Kepemimpinan Dalam Partai Politik (*Party Leadership*)

Duverger menganalisis metode pemilihan pemimpin dalam partai dimana secara resmi pimpinan partai hampir selalu dipilih oleh anggota dan diberi masa jabatan yang cukup singkat, sesuai dengan aturan demokrasi. Dalam praktiknya sistem pemilihan demokratis digantikan dengan metode rekrutmen otokratis: *co-option*, penunjukan oleh badan pusat, pencalonan, dan sebagainya. Data tentang partai-partai di seluruh dunia cenderung menguatkan anggapan Duverger bahwa pemimpin partai muncul dari metode pemilihan yang otokratis. Duverger menghubungkan otokrasi yang tidak terselubung dalam pemilihan kepemimpinan dengan

doktrin sayap kanan, sementara sayap kiri menunjukkan sistem kepemimpinan yang sangat terpusat dan tersentralisasi¹².

Terkait oligarki dalam kepemimpinan, Duverger mengemukakan bahwa Kepemimpinan partai cenderung secara alami mengambil bentuk oligarki. Sesungguhnya 'kelas penguasa' muncul yang kurang lebih tertutup, itu adalah 'lingkaran dalam' yang sulit ditembus. Di sini Duverger tidak berbicara tentang kepemimpinan puncak partai tetapi tentang korps kepemimpinan, yang sering dia samakan dengan calon parlemen dan delegasi konferensi. Duverger mengajukan hipotesis yang tidak biasa tentang penyebab keragaman sosial dalam kepemimpinan partai bahwa sama sekali tidak pasti bahwa susunan sosial dari sekelompok pemimpin terpilih lebih mirip dengan massa anggota daripada susunan sosial dari oligarki pemimpin yang direkrut dengan metode otokratis, sebaliknya, ada setiap alasan untuk menganggap bahwa yang sebaliknya adalah benar. Rakyat desa tidak memilih rakyat desa sebagai perwakilan parlemen mereka, tetapi tampaknya lebih memilih pengacara, karena mereka menganggap mereka lebih mampu membela kepentingan mereka di parlemen. Hasilnya adalah promosi (sirkulasi) elit hanya mungkin terjadi di partai-partai dengan tingkat sentralisasi yang cukup tinggi, di mana para

¹² Janda, K.; King, D. S. 1985. Formalizing and Testing Duverger's Theories on Political Parties. *Comparative Political Studies*, 18(2), 139–169.

pemimpin dapat "memaksakan" kaum muda ke dalam partai, atau di partai-partai yang terorganisir dengan sangat lemah dalam beberapa keadaan luar biasa¹³.

Otoritas Pemimpin dalam pandangan Duverger melihat dua fakta penting yang mendominasi evolusi partai, peningkatan otoritas pemimpin dan kecenderungan bentuk otoritas pribadi. Secara keseluruhan, munculnya partai-partai otoriter bertepatan dengan munculnya partai-partai massa. Partai-partai massa memiliki kecenderungan alamiah untuk menjadi partai-partai yang disiplin¹⁴.

Hubungan antara pemimpin partai dan perwakilan Parlemen dikatakan Duverger berlawanan dengan teori demokrasi, dimana di banyak partai terlihat kecenderungan pemimpin partai untuk memberikan perintah kepada perwakilan parlemen atas nama anggota militan. Duverger membahas berbagai teknik untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan partai, yang akan kami masukkan ke dalam konsep disiplin administrasi yang lebih luas. Hampir setengah dari jumlah partai di dunia memberikan kekuasaan disiplin kepada organ nasional di luar parlemen. Duverger berhipotesis bahwa variasi dalam hubungan antara pemimpin partai dan wakilnya dapat dijelaskan oleh ideologi partai. Dia

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

berpendapat bahwa dominasi perwakilan atas organisasi berlaku terutama untuk partai-partai tipe lama, yang didirikan di atas kaukus, yang pada saat yang sama adalah partai-partai tipe "kelas menengah", yaitu partai-partai konservatif dan tengah. Dalam partai-partai Sosialis terdapat ketegangan, jika bukan keseimbangan, antara para pemimpin internal dan wakil-wakil parlementer. Dengan partai-partai Komunis dan Fasis kita mencapai tahap terakhir perkembangan, yaitu perwakilan parlemen di sini tidak mengontrol partai, melainkan partai mengontrol perwakilan¹⁵.

Partai politik sebagai sebuah institusi memerlukan pemimpin membutuhkan peran pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan secara institusional. Selznick mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan secara inheren bersifat politis. Orang-orang ini disebut pemimpin dengan pekerjaan mereka adalah sebuah tindakan politik. Pemimpin melakukan tiga hal untuk menjaga legitimasi dan kelangsungan lembaganya :

1. Mengelola konsistensi internal organisasi. Pemimpin mengembangkan visi dan misi organisasi. Dia menyeimbangkan masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui motivasi. Dia juga melakukan dan memanfaatkan berbagai seremoni. Para pemimpin ini mengambil bagian dalam membangun pola otobiografi dari

¹⁵ Ibid.

catatan sejarah organisasi mereka dan menggunakan kisah hidup mereka dalam upaya untuk mempengaruhi pengikut mereka.

2. Mengembangkan mekanisme dukungan eksternal yang mengarah pada peningkatan legitimasi organisasi. Pemimpin mengatasi masalah kelembaman organisasi dengan melayani sebagai perantara kognitif melalui interaksi dengan berbagai jaringan, di dalam dan di luar batas-batas organisasi, dimana individu didorong untuk membawa skema ide-ide baru untuk masalah lama serta menemukan masalah baru yang diketahui atau skema bersama yang dapat diketahui.
3. Pemimpin terlibat dalam tindakan untuk mengatasi musuh eksternal. Para pemimpin harus mempertahankan diri dari praktik kemunduran yang ada. Ancaman bisa datang dari tekanan politik, tekanan teknis, atau praktik sosial. Serangan lain datang dari fragmentasi populasi yang awalnya melembagakan praktik tersebut.

Menurut Henry Mintzberg, seorang pemimpin memiliki tiga peran utama. Pertama, peranan pribadi. Seorang pemimpin merupakan figur contoh bagi organisasinya, mengarahkan, membimbing, memerintah, dan menjadi penghubung semua pihak. Kedua, peranan pembuat keputusan. Pemimpin harus memiliki kemandirian, keahlian, menghilangkan

rintangan, mengendalikan sumber daya, dan sebagai negosiator. Ketiga, peranan sumber informasi. Pemimpin harus mampu memonitoring dan menyaring informasi sekaligus menjadi juru bicara sebuah organisasi¹⁶. Memfokuskan pada partai politik, menurut Wilhem Hofmeister dan Karsten Grabow, ada beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam partai politik¹⁷.

1. Mengorganisasikan partai politik dengan memahami keadaan yang ada dan apa tantangan baru yang harus diantisipasi.
2. Menilai dan mengevaluasi isu-isu politik yang penting bagi proses politik dan konsekuensi politiknya.
3. Meyakinkan dan mengumpulkan dukungan rakyat atas keputusan politik yang sedang dalam proses pembuatan atau telah dibuat.
4. Mengarahkan tindakan politik yang mengikuti prinsip-prinsip etika, moral, kejujuran, dan kredibilitas.
5. Menyusun strategi, komunikasi, pendekatan, dan tindakan yang harus diambil oleh partai politik.

¹⁶ Badeni. 2014. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

¹⁷ Hofmeister, Wilhem., Karsten Grabow. 2011. *Political Parties : Functions and Organisation in Democratic Societies*. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung.

Sementara itu, *The National Democratic Institute for International Affairs* juga menyebutkan apa yang menjadi peran dari seorang pemimpin partai politik¹⁸.

1. Mengelola kantor dan program partai.
2. Mengusulkan tujuan mengenai perekrutan keanggotaan, uang, komunikasi, dan lain-lain.
3. Mencari masukan dari pejabat terpilih dan aktivis sipil.
4. Berkoordinasi dengan partai lain.
5. Memfasilitasi pengambilan keputusan.
6. Bertanggung jawab atas keberhasilan keuangan.
7. Mengakui dan menggunakan keterampilan dan keahlian anggota.

Selain semua upaya mengenai organisasi, strategi politik, komunikasi, dan program yang sangat diperlukan untuk keberhasilan yang ingin dicapai, partai politik perlu memiliki pemimpin politik yang tepat agar menarik bagi pemilih dan memperkuat soliditas internal. Para pemimpin partai memandu proses pembentukan opini politik dan pengambilan keputusan serta memberikan legitimasi bagi keputusan ini.

¹⁸ The National Democratic Institute for International Affairs. 2001. *Political Parties and The Transition To Democracy*. Washington, DC: NDI.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kesuma Nasution (2022) dalam skripsi berjudul “Eksistensi Partai Islam Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai Islam masih sulit meraih suara dan juga belum mampu mengungguli partai berbasis nasional. Perolehan suara pada Pemilu 1999-2019 menunjukkan bahwa perolehan suara partai-partai Islam cenderung stagnan dan walaupun terjadi peningkatan, masih belum bisa mengungguli perolehan suara partai-partai Islam. Penyebab perolehan suara partai Islam belum mampu mengungguli partai nasional karena masyarakat Kota Medan khususnya yang beragama Islam masih relatif pragmatis (siapa yang memberi lebih akan dipilihnya), Terjadi fragmentasi di kalangan umat Islam menjadi beberapa partai. Dan faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai Islam di Kota Medan adalah karena kader dari salah satu partai Islam yang terjerat korupsi, masyarakat merasa tidak diperhatikan kepentingannya, dan tidak adanya tokoh partai yang diketahui oleh masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Fransiska Ignasia (2022) dalam skripsi berjudul “Eksistensi Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dilakukan partai politik yang berasaskan Islam di Kabupaten Mamasa adalah merekrut kandidat dari kalangan nonmuslim dan mencitrakan diri sebagai partai pluralis. Pemilu tahun 2019 menjadikan Mamasa salah satu kabupaten yang mayoritas pemilihnya Kristen namun perolehan suara partai Islam cukup signifikan. Perolehan suara partai Islam di kabupaten tersebut apabila diakumulasikan maka secara keseluruhan partai Islam mendapatkan 30% lebih perolehan kursi dari jumlah kursi di DPRD. Sementara penerimaan masyarakat terhadap partai politik Islam di Kabupaten Mamasa dikarenakan asas partai tidak mempengaruhi perilaku pemilih dan isu identitas agama tidak mempengaruhi perilaku pemilih.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Arri Shaputra (2023) dalam skripsi berjudul “Peran Organisasi Sayap Partai PKS Muda Terhadap Eksistensi Partai Di Kalangan Generasi Muda Kota Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi sayap partai PKS Muda terhadap eksistensi partai di kalangan generasi muda Kota Jambi meliputi dalam proses rekrutmen dan sarana

penciptaan kaderisasi PKS sebagai partai politik, melakukan pendidikan politik terhadap para kader generasi muda dan pemilih muda Kota Jambi, ikut serta secara aktif dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja kader dari partai politik yang duduk di kursi legislatif, serta ikut serta dalam memajukan dan menunjukkan jati diri sebagai organisasi partai yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh PKS. Faktor pendukung bagi PKS Muda untuk melaksanakan perannya guna eksistensi partai di kalangan generasi muda Kota Jambi meliputi penguatan internal partai dengan organisasi sayap partai dan kekuatan akuntabilitas partai PKS. Sementara itu faktor penghambat bagi PKS Muda untuk melaksanakan perannya guna eksistensi partai di kalangan generasi muda Kota Jambi meliputi kurangnya kebijakan khusus dari PKS untuk organisasi sayap partai PKS Muda dan perubahan iklim politik yang terjadi dalam PKS.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini memperlihatkan perbedaan. Perbedaan ini tampak pada objek penelitian yang dipilih yaitu Partai Persatuan Pembangunan, dimana secara nasional dan provinsi Sulawesi Selatan perolehan suara partai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Walau demikian, hal berbeda terjadi di Kabupaten

Gowa dimana Partai Persatuan Pembangunan mampu meraih kemenangan dalam Pemilu 2019, berhasil mengalahkan dominasi Partai Golkar dan partai nasionalis lainnya.

2.4. Kerangka Pemikiran

Geliat politik Indonesia selepas Orde Baru melahirkan banyak partai Islam. Dari puluhan partai lahir pada awal masa reformasi, tidak banyak partai Islam bertahan. Terhitung hanya ada empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR periode 2019-2024, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP cenderung memiliki basis pada umat NU dan kelompok Islam tradisional lainnya. PPP juga selalu menyerukan bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai warisan para ulama Indonesia di masa lalu.

PPP sebagai partai Islam tertua yang masih eksis hingga hari ini, tidak berbanding dengan kekuatan elektoralnya yang semakin merosot. Walaupun faktanya demikian, Partai Persatuan Pembangunan mengalami kenaikan suara dan kemenangan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gowa berhasil meraih perolehan suara dengan persentase 14,64%.

PPP mendapat kursi terbanyak DPRD Kabupaten Gowa dalam pemilihan legislatif 2019. Partai berlambang Ka'bah itu berhasil meloloskan 8 (delapan) usungan caleg untuk menduduki kursi DPRD Gowa. Hasil ini juga memastikan PPP mendapat kursi Ketua DPRD Gowa Periode 2019-2024. Kemenangan ini tak lepas dari sosok figur Amir Uskara, putra asli Kabupaten Gowa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP dan Ketua Fraksi PPP di DPR-RI periode 2019-2024. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi PPP di Kabupaten Gowa untuk mendapatkan dukungan masyarakat karena pengaruh ketokohan Amir Uskara dan membuat orang tertarik untuk mencalonkan diri melalui PPP.

